

**STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
DI WILAYAH PEDESAAN**

Sifa Fauziah¹, Abas Kurniawan², Asmak Ul Hosna S³

sifafauziah18.08@gmail.com¹, abaskurniawan530@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan

Abstrak: Penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan merupakan tantangan serius dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keamanan masyarakat. Artikel ini mengeksplorasi strategi-strategi efektif untuk mengatasi masalah ini, termasuk penguatan penegakan hukum lokal, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan holistik dan berbasis masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan pedesaan yang lebih berkelanjutan dan aman dari tindak pidana lingkungan.

Kata Kunci: Lingkungan, Masyarakat, Pedesaan, Tindak Pidana.

***Abstract:** Overcoming environmental crimes in rural areas is a serious challenge in maintaining environmental sustainability and community security. This article explores effective strategies to address this problem, including strengthening local law enforcement, increasing public awareness, and collaboration between government, non-governmental organizations, and the private sector. With a holistic and community-based approach, it is hoped that a rural environment that is more sustainable and safe from environmental crimes can be created.*

***Keyword:** Environment, Society, Rural Areas, Crime.*

PENDAHULUAN

Wilayah pedesaan seringkali menjadi kawasan rentan terhadap tindak pidana lingkungan yang merusak, mengancam keberlanjutan ekosistem, serta merugikan kesejahteraan masyarakat lokal. Tindak pidana lingkungan seperti illegal logging, pencemaran sungai, dan pembakaran hutan seringkali terjadi di wilayah pedesaan karena berbagai faktor, termasuk minimnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Dampak dari tindak pidana lingkungan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup, tetapi juga mengancam keamanan dan stabilitas sosial di wilayah pedesaan. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari degradasi lingkungan juga dapat berdampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka.

Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi-strategi yang efektif perlu dirancang untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi lingkungan, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, artikel ini akan mengeksplorasi berbagai strategi penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan, serta menyoroti pentingnya upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan keamanan masyarakat di daerah ini. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan potensi solusi, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk melindungi lingkungan pedesaan dari ancaman tindak pidana lingkungan serta memastikan keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat normatif dengan memanfaatkan studi kepustakaan dengan pengumpulan data dari dokumen primer dan dokumen sekunder dari berbagai sumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana lingkungan merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang merusak atau mengancam kelestarian lingkungan hidup. Beberapa contoh tindak pidana lingkungan termasuk:

1. Illegal Logging

Penebangan pohon secara ilegal tanpa izin atau di luar batas-batas yang ditetapkan, yang menyebabkan kerusakan pada hutan dan ekosistemnya.

2. Pencemaran Lingkungan

Pembuangan limbah industri atau domestik secara tidak terkontrol ke dalam air, udara, atau tanah, yang dapat merusak kualitas air minum, udara yang sehat, dan keseimbangan ekosistem.

3. Pembakaran Lahan Hutan

Pembakaran hutan secara ilegal untuk membersihkan lahan pertanian atau perkebunan, yang dapat menyebabkan kerugian habitat bagi satwa liar dan meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan.

4. Perburuan Satwa Liar Terlarang

Perburuan hewan langka atau dilindungi secara ilegal untuk diperdagangkan, mengancam keberlangsungan populasi spesies tersebut dan merusak keseimbangan ekosistem.

5. Penambangan Tanpa Izin

Penambangan mineral atau logam tanpa izin yang merusak lahan dan ekosistem alami serta menyebabkan degradasi lingkungan.

6. Pencurian Sumber Daya Alam

Pengambilan sumber daya alam seperti pasir, batu, atau tanah secara ilegal tanpa izin, yang dapat mengganggu ekosistem dan mengarah pada erosi tanah.

Tindak pidana lingkungan memiliki dampak yang serius tidak hanya pada lingkungan hidup, tetapi juga pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat dan upaya pencegahan yang efektif sangat penting untuk melindungi lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

• **Wilayah Pedesaan**

Wilayah pedesaan merupakan bagian dari suatu negara yang terletak di luar kawasan perkotaan yang padat dan berkembang pesat. Secara geografis, wilayah ini seringkali dipenuhi oleh lahan pertanian yang luas, hutan, dan pemukiman yang tersebar. Kehidupan di pedesaan cenderung lebih tenang dan lambat dibandingkan dengan kehidupan perkotaan yang sibuk.

Penduduk di wilayah pedesaan biasanya memiliki gaya hidup yang sangat terhubung dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan utama penduduk seringkali terkait dengan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kegiatan lain yang terkait dengan sumber daya alam. Mereka sering kali menjadi petani, peternak, atau pekerja yang terlibat dalam industri primer.

Dibandingkan dengan kota, wilayah pedesaan umumnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Pemukiman penduduk tersebar di sepanjang jalanjalan pedesaan, dengan rumah-rumah yang seringkali memiliki halaman dan kebun sendiri. Akses terhadap fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar sering kali terbatas, terutama di daerah yang lebih terpencil.

Selain itu, wilayah pedesaan juga dikenal karena keindahan alamnya yang masih asli. Hutan, sungai, dan pegunungan sering kali menjadi ciri khas pedesaan, menyediakan habitat bagi berbagai flora dan fauna yang beragam. Keberadaan taman-taman nasional dan kawasan konservasi alam seringkali menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam yang masih alami.

Meskipun memiliki keindahan alamnya sendiri, wilayah pedesaan juga menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, pertanian yang berkelanjutan sering kali sulit dilakukan karena perubahan iklim dan praktik pertanian yang kurang berkelanjutan. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas serta kurangnya peluang ekonomi sering kali menjadi masalah bagi penduduk pedesaan.

Dalam beberapa kasus, wilayah pedesaan juga menjadi target tindak pidana lingkungan seperti illegal logging, pencemaran sungai, dan perburuan liar ilegal. Keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum sering membuat wilayah ini rentan terhadap eksploitasi yang merugikan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Dengan memperhatikan keunikan dan tantangan wilayah pedesaan, kita dapat menciptakan solusi

yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan.

- Strategi Penanggulangan

Strategi penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan melibatkan berbagai pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, penting untuk memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan kehadiran dan efektivitas aparat penegak hukum di pedesaan. Ini mencakup peningkatan patroli, penyelidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

Selanjutnya, edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan bagian kunci dari strategi ini. Melalui kampanye penyuluhan dan pelatihan, masyarakat pedesaan dapat diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindak pidana lingkungan. Ini bisa merubah perilaku mereka dan memperkuat dukungan untuk penegakan hukum.

Kolaborasi antara berbagai pihak juga penting. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal perlu bekerja sama dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan. Dengan berbagi sumber daya, informasi, dan keahlian, mereka dapat meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dan pencegahan.

Pengembangan sanksi hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan. Ini termasuk penegakan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, serta upaya untuk memerangi korupsi atau kolusi yang bisa menghambat penegakan hukum.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian penting dari strategi ini. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan lingkungan dan melaporkan aktivitas mencurigakan, serta memberikan dukungan bagi upaya pemberdayaan ekonomi alternatif, mereka dapat menjadi mitra yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Terakhir, investasi dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi juga diperlukan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi sensor dan pemantauan satelit untuk mendeteksi aktivitas ilegal, serta pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan pos pengawasan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengawasan terhadap wilayah pedesaan.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara serius dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan pedesaan yang lebih aman, lestari, dan sejahtera bagi masyarakatnya.

- Kolaborasi Stakeholder

Kolaborasi stakeholder dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan mengacu pada upaya bersama antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam menjaga lingkungan hidup dan memerangi kejahatan lingkungan. Para stakeholder ini termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

1. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyusun kebijakan, mengatur penegakan hukum, dan menyediakan sumber daya untuk mengatasi tindak pidana lingkungan. Mereka dapat memfasilitasi kerja sama antara stakeholder lainnya dan memberikan dukungan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM seringkali menjadi suara bagi lingkungan dan masyarakat dalam menuntut keadilan dan menekan pemerintah dan perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka dapat memberikan keahlian teknis, advokasi, dan dukungan sosial kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana

lingkungan.

3. Sektor Swasta

Perusahaan dan industri memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasi mereka secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM, sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam mendukung upaya penegakan hukum, menyediakan sumber daya, dan mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan.

4. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan bagian penting dari upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan. Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan mereka dan sering kali menjadi saksi atau korban langsung dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan partisipasi aktif, kolaborasi stakeholder dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama.

Melalui kolaborasi stakeholder yang kokoh dan terkoordinasi, berbagai pihak dapat saling mendukung, berbagi sumber daya, dan mengatasi tantangan bersama dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan. Ini memungkinkan untuk adanya pendekatan holistik yang lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal.

• Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan adalah konsep yang menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kegiatan manusia dan ekosistem alami untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat bertahan dan terus tersedia bagi generasi mendatang. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan, keberlanjutan lingkungan menjadi aspek kunci yang perlu dipertimbangkan.

Upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan harus memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Langkah-langkah penegakan hukum dan pencegahan harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti pelestarian keanekaragaman hayati, konservasi air dan tanah, serta pemulihan ekosistem yang rusak.

Kolaborasi stakeholder yang efektif juga dapat berperan dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Dengan berkerja sama, berbagai pihak dapat mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, dan penggunaan teknologi hijau dalam proses produksi.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan elemen penting dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam jangka panjang, upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan yang berkelanjutan di wilayah pedesaan akan membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan merupakan tujuan utama yang harus diperjuangkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan.

KESIMPULAN

Penanggulangan tindak pidana lingkungan di wilayah pedesaan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman tentang jenis-jenis kejahatan lingkungan, tantangan khusus yang dihadapi di pedesaan, serta pengembangan strategi penanggulangan yang efektif.

Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lsm, sektor swasta, dan masyarakat lokal, menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan upaya penanggulangan tersebut. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengintegrasikan sumber daya, keahlian, dan upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah pedesaan.

Keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan, dengan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya efektif dalam menangani tindak pidana lingkungan, tetapi juga berdampak positif dalam menjaga ekosistem alami dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, implementasi strategi penanggulangan yang berkelanjutan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di pedesaan untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhiarto, Herman, Cahyo “Pengembangan Wilayah Perdesaan Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bondowoso” 2018, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/2528> Diakses pada tgl 13 April 2024.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan” Juli 2022, https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Buku_Kewenangan_Penegakan_Hukum_ISBN.pdf diakses pada tgl 13 April 2024.
- Fauziyah, Nur, Rosyda, “Pengertian Desa: Kerja Sama, Fungsi, dan Ciri-Ciri Masyarakat Desa” <https://www.gramedia.com/literasi/strategipemberdayaan-masyarakat/> diakses pada tgl 12 April 2024.
- Pramudita, Bernadinus “Kolaborasi Stakeholders: Kunci Masyarakat Semakin Maju” 16 Oktober 2023 <https://www.marketeers.com/kolaborasi-stakeholderskunci-masyarakat-semakin-maju/> diakses pada tgl 13 April 2024.
- Rachmat, Aulia, Niken “Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Februari, 24, 2022, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53737> Diakses pada tgl 13 April 2024.
- Usman, Rashif “Pengertian Keberlanjutan Lingkungan dan Manfaatnya” 21 September 2023 <https://esgindonesia.com/literasi/pengertiankeberlanjutan-lingkungan-dan-manfaatnya-2/> diakses pada tgl 13 April 2024.